



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنه

### PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu adanya tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan aparat pembinaan dan pemberdayaan intern pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati.
5. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kampung selanjutnya disebut dengan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
12. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
13. Musyawarah kampung adalah musyawarah antara rayat genap mupakat, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh rayat genap mupakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh reje setelah dibahas dan disepakati bersama Rayat Genap Mupakat.
15. Keputusan reje adalah keputusan yang ditetapkan oleh reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun peraturan reje kampung.
16. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
18. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
19. Rekening kas kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh kabupaten kepada kampung yang tidak habis digunakan oleh kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBKampung (SiLPA).
21. Pembangunan kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
22. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat hak asal usul.
23. Kewenangan lokal berskala kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
24. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang tata cara pembagian dana dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

**BAB III**  
**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG**

**Pasal 3**

- (1) Prioritas penggunaan dana kampung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Prioritas penggunaan dana kampung diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan kampung atau kawasan perkampungan, BUMKampung atau BUMKampung bersama, embung, sarana olah raga kampung sesuai dengan kewenangan kampung.
- (4) Pembangunan sarana olah raga kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMKampung atau BUMKampung bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kampung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan dana kampung diatur dengan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan kampung.

**BAB IV**  
**PENGALOKASIAN DANA KAMPUNG**

**Pasal 4**

- (1) Pengalokasian dana kampung setiap kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD\ Kab = AD\ Kab + AA\ Kab + AF\ Kab$$

Keterangan:

DD Kab = Dana Kampung setiap kabupaten

AD Kab.. /

AD Kab = Alokasi Dasar setiap kabupaten  
AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten  
AF Kab = Alokasi Formula setiap kabupaten

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara merata kepada setiap kampung.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen)dari anggaran dana kampung dibagi secara proporsional kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana kampung dibagi secara proporsional kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks kampung membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial
- (6) Kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok kampung pada kampung ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana kampung dibagi berdasarkan jumlah penduduk kampung, angka penduduk miskin kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKK kabupaten.

## Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan alokasi dasar setiap kampung dengan jumlah kampung di daerah kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah kampung secara nasional

- (3) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Kampung yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} * DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} * DT \text{ Kab})$$

Keterangan:

AA Kab	= Alokasi Afiriasi setiap kabupaten
AA DST	= Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab	= Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten
AA DT	= Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab	= Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap kampung.
- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi setiap kampung
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Kampung} = (0,03 * DD) / ((2 * DST) + (1 * DT))$$

Keterangan :

AA Kampung	= Alokasi Afiriasi setiap kampung
DD	= Pagu dana kampung nasional
DST	= Jumlah kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= Jumlah kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

### Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Kab} = \{(0, 10 * Y1) + (0, 50 * Y2) + (0, 15 * Y3) + (0, 25 * Y4)\} * (0,20 * DD)$$

Keterangan:

AF Kab = Lokasi Formula setiap kabupaten terhadap total penduduk Kampung nasional

- Y1 = rasio jumlah penduduk kampung setiap
- Y2 = rasio jumlah penduduk miskin kampung setiap kabupaten terhadap total penduduk miskin kampung nasional
- Y3 = rasio luas wilayah kampung setiap kabupaten terhadap total luas wilayah kampung nasional
- Y4 = rasio IKK kabupaten terhadap total IKK kabupaten yang memiliki kampung

- (2) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan IKK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian dana kampung setiap Kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana kampung setiap kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, dan luas wilayah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian dana kampung dapat menggunakan data kampung induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (6) Data jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung dan luas wilayah kampung yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

## BAB V PENGHITUNGAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

### Pasal 8

- (1) Berdasarkan rincian dana kampung setiap daerah kabupaten, bupati melakukan penghitungan rincian dana kampung setiap kampung.
- (2) Rincian dana kampung setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar setiap kampung;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap kampung; dan
  - c. Alokasi Formula setiap kampung

Pasal 9.

## Pasal 9

Besaran Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah kampung di Kabupaten Aceh Tengah.

## Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

## Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

F Kampung	= Alokasi Formula setiap kampung
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah terhadap total luas kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten
AF Kab	= Alokasi Formula setiap kabupaten setiap

- (3) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin kampung dan IKG kampung.
- (4) IKG kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) IKG kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi... /

- b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (6) Perhitungan dan Rincian besaran alokasi dana kampung (APBN) untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB V**  
**PENYALURAN DANA KAMPUNG**  
Pasal 12

- (1) Penyaluran dana kampung dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas kampung.
- (2) Penyaluran dana kampung dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dana kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penyaluran dana kampung dari RKUD ke Rekening Kas Kampung dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa qanun kampung mengenai APBKampung yang sudah menggunakan aplikasi siskeudes dari reje;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya dari reje;
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II dari reje.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum

memenuhi... ✓

memenuhi kebutuhan input data, reje dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Reje menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan relalisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), reje dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran dana kampung dalam hal :
  - a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4);
  - b. terdapat sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran

berjalan. ✓

berjalan sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung.
- (6) Dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksid pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana kampung yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa dana kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Reje yang bersangkutan mengenai dana kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa dana kampung di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran dana kampung tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam 

- (7) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap kedua dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana kampung menyalurkan sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran dana kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa dana kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 90 Tahun 2017 tentang penetapan tata cara pembagian dan rincian dana kampung setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 29 Januari 2018

 BUPATI ACEH TENGAH

 SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 29 Januari 2018

  
Sekretaris Daerah  
KARIMANSYAH I













(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
291	RUSIP ANTARA	TANJUNG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	275	0.0013	0.0001	56	0.0034	0.0017	6.18	0.0014	0.0032	43.77	0.0032	0.0008	0.0029	45,992	662,337
292	RUSIP ANTARA	MARANDIH PAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	383	0.0018	0.0002	131	0.0079	0.0040	25.15	0.0058	0.0309	47.05	0.0035	0.0009	0.0059	95,027	711,372
293	RUSIP ANTARA	KUALA RAWA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	407	0.0020	0.0002	113	0.0068	0.0034	16.57	0.0039	0.0006	58.42	0.0043	0.0011	0.0053	85,075	701,420
294	RUSIP ANTARA	P LAR WIH KIRI	616,345	SANGAT TERTINGGAL	1	0	506	0.0024	0.0002	17	0.0010	0.0005	0.96	0.0002	0.0000	64.33	0.0048	0.0012	0.0020	31,974	648,319
295	RUSIP ANTARA	LUT JAYA	616,345	SANSAT TERTINGGAL	4	0	251	0.0012	0.0001	101	0.0051	0.0031	9.56	0.0022	0.0003	76.57	0.0057	0.0014	0.0049	79,452	695,797
<b>Total</b>			<b>181,821,775</b>		<b>0</b>	<b>108,407</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>16,497</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>4,318.39</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>13,480.53</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>1.0000</b>	<b>16,104,771</b>	<b>197,926,546</b>	

**Kontrol Penghitungan**

Pagu Dana Desa Kabupaten Aceh Tengah	197,926,546
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Aceh Tengah	197,926,546
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Tengah	181,821,775
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Tengah	181,821,775
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Aceh Tengah	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Aceh Tengah	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tengah	16,104,771
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tengah	16,104,771
Jumlah Desa	295

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%


  
 BUPATI ACEH TENGAH b  
 SHABELA ABUBAKAR

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2018

TANGGAL 29 JANUARI 2018

## RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (APBN)

KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH DANA KAMPUNG (APBN)
1	2	3	4
1	LINGE	1. Delung Sekinel	651,905,000
		2. Gelampang Gading	648,320,000
		3. Gewat	708,505,000
		4. Jamat	659,024,000
		5. Kemerleng	672,919,000
		6. Kute Baru	656,967,000
		7. Kute Keramil	674,878,000
		8. Kute Rayang	724,520,000
		9. Kute Riyem	660,443,000
		10. Kute Robel	702,216,000
		11. Linge	663,461,000
		12. Lumut	677,398,000
		13. Mungkur	709,128,000
		14. Owaq	697,327,000
		15. Pantan Nangka	682,634,000
		16. Penarun	692,364,000
		17. Simpang Tiga Uning	718,341,000
		18. Umang	758,198,000
		19. Despot Linge	689,401,000
		20. Gemboyah	690,682,000
		21. Arul Item	706,751,000
		22. Ise - ise	733,971,000
		23. Kute Reje	671,393,000
		24. Reje Payung	679,643,000
		25. Pantan Reduk	695,075,000
		26. Antara	659,691,000
		JUMLAH	17,885,155,000
2	SILIH NARA	27. Arul Gele	654,501,000
		28. Arul Kumer	695,320,000

29. Burni Bius.

		29. Burni Bius	644,401,000
		30. Genting Gerbang	669,786,000
		31. Gunung Singit	650,330,000
		32. Pepayungan Angkup	691,199,000
		33. Remesen	650,538,000
		34. Rutih	690,593,000
		35. Semelit Mutiara	707,147,000
		36. Wih Porak	653,233,000
		37. Wihni Bakong	652,370,000
		38. Wihni Durin	689,087,000
		39. Arul Putih	658,795,000
		40. Arul Relem	707,433,000
		41. Burni Bius Baru	641,042,000
		42. Jerata	726,333,000
		43. Paya Beke	718,509,000
		44. Paya Pelu	677,545,000
		45. Rebe Gedung	638,687,000
		46. Reremal	670,601,000
		47. Sanehen	651,329,000
		48. Simpang Kemili	668,345,000
		49. Tenebuk Kampung Baru	662,359,000
		50. Terang Engon	668,038,000
		51. Wih Pesam	686,097,000
		52. Bius Utama	655,622,000
		53. Mekar Indah	648,815,000
		54. Mulie Jadi	691,855,000
		55. Wih Bersih	638,608,000
		56. Wih Sagi Indah	647,600,000
		57. Arul Kumer Barat	675,400,000
		58. Arul Kumer Timur	669,614,000
		59. Arul Kumer Selatan	670,059,000
		JUMLAH	22,121,191,000
3	BEBESEN	60. Kolak I	668,839,000
		61. Bebesen	662,611,000
		62. Mongal	674,692,000
		63. Daling	654,478,000
		64. Tensaran	690,184,000
		65. Lelabu	642,465,000
		66. Blang Gele	654,671,000
		67. Kemili	701,710,000
		68. Tan Saril	643,260,000

	69. Blang Kolak II	660,153,000
	70. Umang	643,502,000
	71. Simpang IV	668,871,000
	72. Bahgie	648,060,000
	73. Keramat Mufakat	739,680,000
	74. Atu Gajah Reje Guru	668,733,000
	75. Atu Tulu	648,802,000
	76. Burbiah	674,780,000
	77. Empus Talu	641,303,000
	78. Gele Lah	636,354,000
	79. Kebet	654,470,000
	80. Lemah Burbana	656,925,000
	81. Mah Bengi	652,928,000
	82. Nunang Antara	709,525,000
	83. Pendere Saril	657,557,000
	84. Sadong Juru Mudi	640,654,000
	85. Ulu Nuweh	665,791,000
	86. Calo Blang Gclc	649,531,000
	87. Kala Kemili	659,205,000

**JUMLAH**

**18,569,734,000**

4	<b>PEGASING</b>	
	88. Arul Badak	723,152,000
	89. Berawang Baro	681,209,000
	90. Gelelungi	684,584,000
	91. Ie Relop	678,616,000
	92. Kayu Kul	649,648,000
	93. Kedelah	639,717,000
	94. Kung	680,056,000
	95. Kute Lintang	763,166,000
	96. Lelumu	679,675,000
	97. Paya Jeget	663,966,000
	98. Pedekok	659,301,000
	99. Pegasing	730,917,000
	100. Pepalang	688,404,000
	101. Simpang Kelaping	706,912,000
	102. Tebuk	672,976,000
	103. Terang Ulen	660,867,000
	104. Ujung Gele	695,796,000
	105. Wih Ilang	717,671,000
	106. Wih Nareh	648,904,000
	107. Wih Lah	663,752,000
	108. Jejem	657,303,000

		109. Jurusen	640,332,000
		110. Kala Pegasing	645,330,000
		111. Linung Ayu	647,552,000
		112. Panangan Mata	657,444,000
		113. Pantan Musara	721,363,000
		114. Wih Terjun	665,166,000
		115. Blang Bebangka	720,615,000
		116. Uning	724,948,000
		117. Uring	667,592,000
		118. Suka Damai	655,312,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>21,092,246,000</b>
<b>5</b>	<b>BINTANG</b>		
		119. Atu Payung	696,120,000
		120. Bale Nosar	656,546,000
		121. Bamil Nosar	655,015,000
		122. Bewang	655,234,000
		123. Dedamar	734,103,000
		124. Genuren	711,538,000
		125. Kala Bintang	647,996,000
		126. Kala Segi	667,714,000
		127. Kejurun Syiah Utama	655,173,000
		128. Kelitu	656,884,000
		129. Kuala I	655,565,000
		130. Kuala II	670,092,000
		131. Linung Bulen I	683,429,000
		132. Linung Bulen II	705,949,000
		133. Mengaya	705,957,000
		134. Mude Nosar	657,985,000
		135. Serule	722,166,000
		136. Wakil Jalil	663,601,000
		137. Wihlah Setie	671,648,000
		138. Gegarang	669,402,000
		139. Jamur Konyel	667,390,000
		140. Merodot	649,062,000
		141. Sintep	667,161,000
		142. Gele Pulo	647,661,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>16,173,391,000</b>
<b>6</b>	<b>KETOL</b>		
		143. Bah	659,084,000
		144. Belang Mancung	644,011,000
		145. Bintang Pepara	685,669,000
		146. Burlah	651,652,000

	147. Buter	652,374,000
	148. Cang Duri	655,252,000
	149. Gelumpang Payung	645,663,000
	150. Jaluk	651,786,000
	151. Kala Ketol	719,830,000
	152. Karang Ampar	728,488,000
	153. Kekuyang	693,290,000
	154. Kute Gelime	657,435,000
	155. Pantan Penyo	676,446,000
	156. Pantan reduk	657,547,000
	157. Pondok Balik	651,555,000
	158. Rejewali	653,321,000
	159. Serempah	712,481,000
	160. Bergang	719,730,000
	161. Blang Mancung Bawah	652,130,000
	162. Buge Ara	669,346,000
	163. Genting Bulen	654,346,000
	164. Jalan Tengah	672,810,000
	165. Jerata	649,823,000
	166. Simpang Juli	669,601,000
	167. Selon	658,015,000

**JUMLAH**

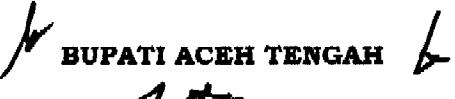
**16,741,685,000**

7	<b>KEBAYAKAN</b>	
	168. Bukit Sama	644,926,000
	169. Gunung Bukit	638,279,000
	170. Jongok Meluem	641,169,000
	171. Kelupak Mata	657,750,000
	172. Lot Kala	662,415,000
	173. Mendale	658,735,000
	174. Paya Reje Tami Delem	644,168,000
	175. Paya Tumpi	639,412,000
	176. Pinangan	684,734,000
	177. Bukit	632,271,000
	178. Bukit Iwih Tami Delem	645,309,000
	179. Gunung Bahgie	654,665,000
	180. Gunung Balohen	643,594,000
	181. Jongok Bathin	645,626,000
	182. Kala Lengkio	641,049,000
	183. Kute Lot	656,948,000
	184. Paya Tumpi Baru	654,038,000
	185. Paya Tumpi I	639,625,000
	186. Timangan Gading	686,744,000

		187. Telege Atu	639,820,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>13,011,577,000</b>
<b>8</b>	<b>KUTE PANANG</b>		
	188. Atu Gogop		658,877,000
	189. Balik		667,224,000
	190. Buter Balik		654,662,000
	191. Dedingin		653,621,000
	192. Kute Panang		640,592,000
	193. Lukub Sabun		659,017,000
	194. Pantan Sile		646,727,000
	195. Ratawali		636,726,000
	196. Segene Balik		677,323,000
	197. Tapak Moge		643,722,000
	198. Tawar Miko		650,222,000
	199. Tawardi		649,261,000
	200. Timang Rasa		674,647,000
	201. Wih Nongkal		655,344,000
	202. Bukit Rata		659,078,000
	203. Lukub Sabun Timur		681,271,000
	204. Lukub Sabun Tengah		644,777,000
	205. Lukub Sabun Barat		669,790,000
	206. Wih Nongkal Toa		671,142,000
	207. Tapak Moge Timur		638,077,000
	208. Empu Balik		645,948,000
	209. Blang Balik		640,015,000
	210. Kala Nongkal		643,908,000
	211. Pantan Jerik		641,483,000
	<b>JAMLAH</b>		<b>15,703,454,000</b>
<b>9</b>	<b>CELALA</b>		
	212. Arul Gading		680,259,000
	213. Blang Kekumur		717,702,000
	214. Berawang Gading		694,339,000
	215. Celala		748,994,000
	216. Cibro		675,028,000
	217. Kuyun		748,763,000
	218. Kuyun Toa		649,945,000
	219. Kuyun Uken		745,512,000
	220. Makmur		650,829,000
	221. McLala		713,649,000
	222. Paya Kolak		739,549,000
	223. Ramung Ara		653,824,000
	224. Sepakat		648,433,000

		225. Tanoh Depet	687,224,000
		226. Uning Berawang Ramung	651,734,000
		227. Blang Delem	664,074,000
		228. Depet Indah	678,770,000
<b>JUMLAH</b>			<b>11,748,628,000</b>
<b>10</b>	<b>LUT TAWAR</b>		
		229. Takengon Timur	688,142,000
		230. Asir - Asir	672,387,000
		231. Asir Asir Asia	650,121,000
		232. Bale Atu	662,045,000
		233. Bujang	646,840,000
		234. Gunung Suku	696,067,000
		235. Hakim Bale Bujang	721,095,000
		236. Kenawat	704,762,000
		237. Kuteni Reje	637,228,000
		238. Pedemun One one	642,252,000
		239. Rawe	687,470,000
		240. Takengon Barat	662,720,000
		241. Toweren Antara	680,407,000
		242. Toweren Toa	669,470,000
		243. Toweren Uken	654,789,000
		244. Teluk One One	633,355,000
		245. Merah Mersa	641,639,000
		246. Waq Toweren	674,136,000
<b>JUMLAH</b>			<b>12,024,925,000</b>
<b>11</b>	<b>ATU LINTANG</b>		
		247. Atu Lintang	729,700,000
		248. Merah Mege	672,149,000
		249. Merah Pupuk	670,937,000
		250. Merah Muyang	706,630,000
		251. Gayo Murni	684,128,000
		252. Kepala Akal	684,534,000
		253. Tanoh Abu	677,566,000
		254. Bintang Kekelip	652,102,000
		255. Merah Jernang	697,714,000
		256. Damar Mulyo	659,745,000
		257. Pantan Damar	655,752,000
<b>JUMLAH</b>			<b>7,490,957,000</b>
<b>12</b>	<b>JAGONG JEGET</b>		
		258. Merah Sald	665,473,000
		259. Berawang Dewal	706,415,000
		260. Gegarang	694,400,000
		261. Telege Sari	660,784,000

		262. Jeget Ayu	655,779,000
		263. Paya Tungel	678,489,000
		264. Jagong Jeget	652,251,000
		265. Bukit Sari	653,716,000
		266. Bukit Kemuning	672,590,000
		267. Paya Dedep	648,720,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>6,688,617,000</b>
<b>13</b>	<b>BIES</b>		
		268. Kampung Bies Penantanan	655,773,000
		269. Kampung Bies Baru	649,651,000
		270. Kampung Bies Mulie	641,603,000
		271. Kampung Arul Latong	654,991,000
		272. Kampung Simpang Lukup Badak	643,035,000
		273. Kampung Atang Jungket	652,286,000
		274. Kampung Tebes Lues	644,320,000
		275. Kampung Pucuk Deku	642,054,000
		276. Kampung Lenga	642,608,000
		277. Kampung Uning Pegantungan	648,734,000
		278. Kampung Simpang Uning Niken	638,627,000
		279. Kampung Karang Bayur	636,448,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>7,750,130,000</b>
<b>14</b>	<b>RUSIP ANTARA</b>		
		280. Kampung Pantan Tengah	692,611,000
		281. Kampung Rusip	652,383,000
		282. Kampung Pilar	706,775,000
		283. Kampung Arul Pertik	716,508,000
		284. Kampung Pilar Jaya	678,663,000
		285. Kampung Tirmi Ara	682,848,000
		286. Kampung Atu Singkih	654,787,000
		287. Kampung Pantan Bener	641,045,000
		288. Kampung Kcrawang	662,095,000
		289. Kampung Mekar Maju	672,264,000
		290. Kampung Paya Tampu	745,632,000
		291. Kampung Tanjung	662,337,000
		292. Kampung Merandih Paya	711,372,000
		293. Kampung Kuala Rawa	701,420,000
		294. Kampung Pilar Wih Kiri	648,319,000
		295. Kampung Lut Jaya	695,797,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10,924,856,000</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>197,926,546,000</b>

  
**BUPATI ACEH TENGAH**  
  
**SHABELA ABUBAKAR**